



**DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

Gedung MNC Tower Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No.17 – 19, Kota Jakarta Pusat.

Email: biroperencanaan@kek.go.id

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus
(Januari - Maret)**

Jakarta, April 2026

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK
Triwulan I Tahun 2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian s.d TW I (%)
Perspektif: Stakeholder					
1	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan yang Baik dan Pembentukan KEK yang Berkualitas				
1.1	Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	%	90	70%	77,78%
1.2	Capaian Prioritas Nasional	%	90	32,22%*	35,85%*
1.3	Capaian Indikator Kinerja Utama	%	90	12,5%*	13,89%*
1.4	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	>80 (Baik)	86,39 (Baik)*	100%*
Perspektif: Customer					
2	Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Layanan Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas				
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	indeks	3,1	3,3%*	106,5%*
Perspektif: Internal Business Process					
3	Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas				
3.1	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat	%	90	45%	50%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian s.d TW I (%)
	Jenderal Dewan Nasional KEK				
3.2	Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan Kajian Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Tepat Waktu	%	90	100%	111,1%
3.3	Persentase Penyelesaian Koordinasi Strategi Pengembangan dan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus	%	90	33%	36,6%
4	Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Rekomendasi Kualitas Kinerja Pelaksanaan Pengawasan Internal				
4.1	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	%	90	29%	33%
Perspektif: Learning and Growth					
5	Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik				
5.1	Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	indeks	3 (skala 4)	1	33,3%

*) data per Triwulan IV tahun 2025

Kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan yang Baik dan Pembentukan KEK yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 1: *Tata Kelola Perencanaan yang Baik dan Pembentukan KEK yang Berkualitas*, ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja yaitu:

1.1 Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang

memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN.

Birokrasi yang berkualitas terwujud apabila sistem administrasi pemerintahan yang diimplementasikan memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, hingga akhirnya mampu mencapai tujuan organisasi. Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, koordinasi penyusunan strategi dan kebijakan umum pedoman pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, pelaksanaan pengkajian atas usulan wilayah yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus, pemberian dukungan analisis atas pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah yang belum berkembang, dan penyiapan rekomendasi usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan penyiapan usulan Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Melalui sasaran kegiatan ini diharapkan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK mampu menjalankan sistem pemerintahan yang dikoordinasikan sesuai dengan prinsip *good governance* yang selanjutnya dapat mendorong capaian kinerja organisasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas adalah 90%. Target tahun 2026 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 70%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian s.d TW I
IKU-1.1 Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	%	90%	70%	77,78%

Indikator ini mengukur persentase penyelesaian kajian pengusulan KEK terhadap dokumen usulan KEK yang masuk. Selain itu, indikator ini juga mengukur persentase hasil kajian pengusulan KEK yang disetujui oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK terhadap hasil kajian pengusulan KEK yang disampaikan ke Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK. Capaian ini mencerminkan efektivitas fasilitasi pengusulan dan pembentukan KEK oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK. Capaian ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{\% \text{Penyelesaian Kajian Pengusulan KEK yang berkualitas}}{\%} &= \left(\frac{\sum \text{Penyelesaian kajian pengusulan KEK}}{\sum \text{Dokumen usulan KEK yang masuk}} \times 70\% \right) \\ &+ \left(\frac{\sum \text{Hasil Kajian yang disetujui Sekjen DN KEK}}{\sum \text{Hasil kajian yang disampaikan ke Sekjen DN KEK}} \times 30\% \right) \end{aligned}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	Pengkajian terhadap pemenuhan kriteria lokasi KEK	Terlaksana	Telah dilakukan pemeriksaan atas dokumen pengusulan KEK
2.	Pengkajian terhadap kebenaran dan kelayakan dokumen persyaratan usulan pembentukan KEK	Terlaksana	Telah dilakukan verifikasi kebenaran dokumen terhadap dokumen pengusulan KEK yang masuk
3	Melaporkan hasil kajian usulan pembentukan KEK ke Dewan Nasional KEK	Terlaksana	Hasil evaluasi kesesuaian kriteria lokasi dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pengusulan KEK telah dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat satu proses pengusulan KEK, yaitu usulan perluasan KEK Galang Batang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau. Usulan perluasan tersebut telah diajukan kembali oleh pihak pengusul pada bulan Desember 2025 sebagai tindak lanjut atas proses sebelumnya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melalui pelaksanaan kajian terhadap kebenaran dan kelayakan dokumen persyaratan usulan pembentukan KEK pada Triwulan I Tahun 2026.

Dalam proses evaluasi tersebut, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap kelengkapan dokumen usulan serta kesesuaian lokasi yang diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dokumen usulan perluasan KEK Galang Batang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan kelengkapan yang dipersyaratkan. Adapun beberapa aspek yang masih memerlukan klarifikasi dan penyempurnaan dari pihak pengusul antara lain mencakup kejelasan peta lokasi dan luas area yang diusulkan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, kelengkapan dan kedalaman hasil studi kelayakan, serta konsistensi rencana strategis pengembangan KEK. Selain itu, masih terdapat beberapa komponen dokumen yang dinilai belum selaras dengan kriteria lokasi dan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Sejalan dengan hasil kajian tersebut, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK menyimpulkan bahwa usulan perluasan KEK Galang Batang belum dapat dinyatakan layak untuk diproses lebih lanjut pada tahapan berikutnya. Oleh karena itu, dokumen usulan dimaksud telah dikembalikan kepada pihak pengusul melalui surat dinas perihal Pemenuhan Persyaratan Usulan KEK pada

tanggal 13 Maret 2026, dengan harapan agar pengusul dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum diajukan kembali pada periode selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2026, tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan KEK yang Berkualitas berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya.

1.2 Capaian Prioritas Nasional

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN.

Birokrasi yang berkualitas terwujud apabila sistem administrasi pemerintahan yang diimplementasikan memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, hingga akhirnya mampu mencapai tujuan organisasi. Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, koordinasi penyusunan strategi dan kebijakan umum pedoman pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, pelaksanaan pengkajian atas usulan wilayah yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus, pemberian dukungan analisis atas pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah yang belum berkembang, dan penyiapan rekomendasi usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan penyiapan usulan Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Melalui sasaran kegiatan ini diharapkan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK mampu menjalankan sistem pemerintahan yang dikoordinasikan sesuai dengan prinsip *good governance* yang selanjutnya dapat mendorong capaian kinerja organisasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja capaian prioritas nasional adalah 90%, sedangkan target pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 20%. Target tahun 2026 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 32,22%*, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian s.d TW I
IKU-1.2 Capaian Prioritas Nasional	%	90%	32,22%*	35,8%*

*) data capaian realisasi investasi per Triwulan IV 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Prioritas Nasional merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK berkontribusi secara langsung dalam mengkoordinasikan dan mengawal program-program yang mendukung Prioritas Nasional sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis nasional.

IKU ini menilai efektivitas Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam memastikan K/L selaras dan sinkron atas kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap target-target pembangunan nasional. Adapun Prioritas Nasional yang diemban oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c.q. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK meliputi:

1. Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe
2. Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei
3. Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang
4. Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik.

Capaian ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian Prioritas Nasional} = \left(\frac{\text{Jumlah RO Prioritas Nasional yang Tercapai}}{\text{Jumlah RO Prioritas Nasional yang Diampu}} \times 100\% \right)$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	Pelaporan dan Evaluasi hasil pencapaian kinerja indikator PN tahun 2025	Terlaksana	Pelaporan dan evaluasi hasil pencapaian kinerja RO PN tahun 2025 telah dilaksanakan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Triwulan IV tahun 2025 yang dilaksanakan pada M4 Januari Tahun 2026
2.	Koordinasi Penyusunan Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian indikator PN Tahun 2025	Terlaksana	Koordinasi penyusunan faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian target RO PN tahun 2025 telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026
3	Monitoring capaian kinerja indikator PN Triwulan I tahun 2026	Belum Terlaksana	Monitoring capaian kinerja RO Triwulan I Tahun 2026 akan dilaksanakan bersama dengan Rapat Kerja Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator PN di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus belum dapat disajikan karena data belum tersedia. Oleh karena itu, sementara digunakan data capaian indikator PN pada Triwulan IV Tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, dari 4 (empat) indikator PN yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, sebanyak 2 (dua) indikator telah mencapai target, yaitu Nilai PMA dan PMDN pada KEK Sei Mangkei serta Nilai PMA dan PMDN pada KEK Galang Batang. Sementara itu, 2 (dua) indikator lainnya, yaitu Nilai PMA dan PMDN pada KEK Arun Lhokseumawe dan KEK Gresik, belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025.

Selanjutnya Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK melaksanakan koordinasi atas penyusunan analisis terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat capaian Indikator PN yang diampu. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, secara umum faktor penghambat dalam pencapaian target investasi pada 4 (empat) KEK Prioritas meliputi: (1) belum optimalnya dukungan regulasi terkait penyelenggaraan KEK; (2) implementasi perizinan berusaha berbasis risiko yang belum berjalan secara efektif; (3) keterbatasan dukungan infrastruktur di luar kawasan; serta (4) dinamika ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global.

Sementara itu, faktor pendorong pencapaian target investasi pada 4 (empat) KEK Prioritas antara lain: (1) posisi strategis lokasi KEK; (2) penguatan konektivitas logistik dan aksesibilitas kawasan yang meningkatkan efisiensi rantai pasok dan distribusi; (3) adanya komitmen investasi lanjutan dari pelaku usaha; serta (4) peningkatan kualitas infrastruktur dan utilitas dasar di dalam kawasan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I tahun 2026, terdapat kendala dalam pencapaian target yang berupa kurangnya ketersediaan data terbaru untuk pencapaian target indikator PN. Selain itu, kegiatan monitoring capaian kinerja Indikator PN pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dilaksanakan, mengingat pelaksanaannya dijadwalkan dengan Rapat Kerja Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Triwulan I Tahun 2026.

1.3 Capaian Indikator Kinerja Utama

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN.

Birokrasi yang berkualitas terwujud apabila sistem administrasi pemerintahan yang diimplementasikan memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, hingga akhirnya mampu mencapai tujuan organisasi. Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, koordinasi penyusunan strategi dan kebijakan umum pedoman pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, pelaksanaan pengkajian atas usulan wilayah yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus, pemberian dukungan analisis atas pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah yang belum berkembang, dan penyiapan rekomendasi usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan penyiapan usulan Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan Pemerintah

Pusat. Melalui sasaran kegiatan ini diharapkan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK mampu menjalankan sistem pemerintahan yang dikoordinasikan sesuai dengan prinsip *good governance* yang selanjutnya dapat mendorong capaian kinerja organisasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Capaian Indikator Kinerja Utama adalah 90%, sedangkan target pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 20%. Target tahun 2026 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 13,89%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian s.d TW I
IKU-1.3 Capaian Indikator Kinerja Utama	%	90%	12,5%	13,89%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Indikator Kinerja Utama adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja. IKU dirancang untuk mencerminkan hasil strategis yang ingin dicapai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun IKU yang masuk kedalam penilaian ini adalah:

1. Persentase Capaian Target Investasi KEK
2. Jumlah KEK yang Berdaya Saing
3. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK
4. Persentase Fasilitasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas
5. Persentase Fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus
6. Persentase Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi
7. Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana
8. Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Capaian IKU dihitung berdasarkan realisasi terhadap target tahunan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan relevansi, akurasi, dan konsistensi data. Penilaian atas capaian IKU mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

$$\text{\%Capaian Indikator Kinerja Utama} = \left(\frac{\text{Jumlah IKU yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Total IKU yang Dinilai}} \times 100\% \right)$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan rencana aksi pengawalan capaian IKU 2026	Terlaksana	Rencana Aksi Pengawalan Capaian IKU tahun 2026 telah dilaksanakan bersamaan dengan Penyusunan IKU dalam Perjanjian Kinerja UKE tahun 2026
2.	Pelaporan capaian kinerja tahun 2025	Terlaksana	Telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun Anggaran 2025
3	Pelaksanaan forum dialog kinerja organisasi	Belum Terlaksana	Pelaksanaan forum dialog kinerja organisasi belum terlaksana dan akan segera dilaksanakan pada awal bulan Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK telah melaksanakan serangkaian rencana aksi pada Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Dari tiga rencana aksi yang direncanakan, dua diantaranya telah berhasil dilaksanakan, sementara satu rencana aksi masih dalam tahap persiapan pelaksanaan. Terkait penyusunan rencana aksi pengawalan capaian IKU 2026, kegiatan ini telah terlaksana dengan baik. Penyusunan rencana aksi bersamaan dengan proses Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon I Tahun 2026.

Pada rencana aksi kedua yaitu pelaporan capaian kinerja tahun 2025 telah terlaksana. Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan anggaran tahun sebelumnya, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK telah berhasil menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun Anggaran 2025. Kemudian pelaksanaan forum dialog kinerja organisasi Triwulan I hingga akhir periode pelaporan ini belum terlaksana. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan ini disebabkan oleh faktor penyesuaian jadwal internal organisasi. Meskipun demikian, Biro telah menjadwalkan pelaksanaan forum dialog kinerja tersebut untuk segera dilaksanakan pada awal bulan Triwulan II Tahun 2026, sehingga substansi evaluasi dan dialog kinerja organisasi tetap dapat terselenggara secara komprehensif dalam kerangka waktu yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Dalam pencapaian target IKU pada Triwulan I Tahun 2026, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK menghadapi beberapa kendala yang berdampak pada optimalisasi capaian kinerja organisasi. Pertama, belum terlaksananya forum Dialog Kinerja Organisasi pada periode pelaporan ini disebabkan oleh adanya kebutuhan penyesuaian dan penyelarasan jadwal kegiatan di lingkungan internal organisasi, sehingga pelaksanaannya perlu digeser ke awal Triwulan II Tahun 2026. Kemudian pencapaian IKU bergantung dengan kontribusi dan kinerja unit-unit kerja lain, terutama pada level Unit Kerja Eselon (UKE) I. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja Biro tidak sepenuhnya berada dalam kendali internal, melainkan sangat dipengaruhi oleh sinergi dan koordinasi lintas unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berkomitmen untuk senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan, baik melalui penguatan koordinasi antarunit kerja maupun peningkatan efektivitas mekanisme pemantauan kinerja.

1.4 Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN.

Birokrasi yang berkualitas terwujud apabila sistem administrasi pemerintahan yang diimplementasikan memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, hingga akhirnya mampu mencapai tujuan organisasi. Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, koordinasi penyusunan strategi dan kebijakan umum pedoman pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, pelaksanaan pengkajian atas usulan wilayah yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus, pemberian dukungan analisis atas pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah yang belum berkembang, dan penyiapan rekomendasi usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan penyiapan usulan Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Melalui sasaran kegiatan ini diharapkan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK mampu menjalankan sistem pemerintahan yang dikoordinasikan sesuai dengan prinsip *good governance* yang selanjutnya dapat mendorong capaian kinerja organisasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah >80 (baik). Target tahun 2026 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 86,39 (Baik)*, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian s.d TW I
IKU-1.4 Nilai Kinerja Anggaran	nilai	>80 (Baik)	86,39* (Baik)	100%*

*) data Nilai Kinerja Anggaran (NKA) per Triwulan IV 2025

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan cerminan atas terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja satker yang berkualitas sesuai dengan tata kelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik (*good governance*), efektif, efisien, dan akuntabel. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri atas variabel efektivitas dan variabel efisiensi. Berikut ini yang termasuk ke dalam variabel efektivitas yaitu : (1) capaian indikator kinerja sasaran strategis; (2) capaian indikator kinerja program; (3) dan capaian rincian output. Kemudian, yang termasuk ke dalam variabel efisiensi yaitu : (1) penggunaan standar biaya keluaran; dan (2) efisiensi SBK.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur melalui instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang terdiri dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan (UP dan TUP), dispensasi surat perintah membayar (SPM) dan capaian output. Capaian ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NKA = \frac{(\text{Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran} \times 50\%) + (\text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran} \times 50\%)}{2}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	Pelaporan capaian indikator kinerja sasaran program pada Triwulan I tahun 2026	Terlaksana	Pelaporan capaian indikator kinerja sasaran program Triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan menggunakan dashboard capaian kinerja
2.	Monitoring Pelaporan capaian output pada triwulan I tahun 2026	Terlaksana	Monitoring Pelaporan Capaian Output pada Triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan dengan mengisi dashboard dan mengisi capaian output pada Aplikasi SAKTI
3	Berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait untuk monitoring Nilai Indikator Kinerja	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Biro Umum dan Keuangan terkait monitoring Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

	Pelaksanaan Anggaran pada Triwulan I tahun 2026		Anggaran pada Triwulan I tahun 2026
--	---	--	-------------------------------------

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 107 Tahun 2024 menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan pada satuan kerja, unit kerja eselon I, hingga Kementerian/Lembaga. Dalam perhitungan pada Satker Sekretariat Dewan Nasional KEK, NKA didapatkan dari 2 aspek, yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan bobot 50% dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan bobot 50%. Proses perhitungan NKA dilaksanakan secara tahunan melalui aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dengan mengedepankan prinsip *fair treatment*, sehingga nilai yang dipublikasikan pada saat ini merupakan hasil evaluasi atas pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK berhasil memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 86,39 untuk Tahun Anggaran 2025. Perolehan nilai tersebut menempatkan kinerja anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam kategori "Baik", yang mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang telah berjalan secara efektif dan akuntabel sepanjang tahun anggaran berjalan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I Tahun 2026, tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Biro Pembentukan KEK yang Berkualitas

Pencapaian sasaran program 2: Terwujudnya Layanan Pembentukan KEK yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satuan indikator kinerja yaitu:

2.1 Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Pembentukan KEK

Latar Belakang

Kawasan ekonomi khusus merupakan salah satu instrumen strategis dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional. KEK dirancang untuk memberikan berbagai macam fasilitas dan kemudahan dalam menunjang dan mendorong peningkatan investasi dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan tata kelola yang efektif, efisien dan transparan, terutama dalam membangun kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha pengusul dan pembangun, serta kementerian/lembaga terkait. Dalam hal ini, biro perencana dan pembentukan kawasan ekonomi khusus bertanggung jawab untuk memastikan proses identifikasi, pengusulan, dan penetapan KEK dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penilaian terhadap layanan perencanaan dan pembentukan KEK sangat penting untuk dapat mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Selain itu, aspek pelayanan internal antar satuan kerja juga memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan perencanaan dan pembentukan KEK. Hal ini mencakup penyusunan dan penyelarasan Rencana Strategis, proses perencanaan program dan anggaran yang terkoordinasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) yang sistematis dan berkelanjutan. Sinergi antar unit kerja dalam perencanaan dan penganggaran diperlukan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan. Lebih

lanjut, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan anggaran menjadi instrumen penting dalam menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Dengan adanya pelayanan internal yang efektif, didukung oleh koordinasi yang baik antar satuan kerja, diharapkan proses perencanaan dan pembentukan KEK dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Biro Perencana dan Pembentukan KEK merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan kinerja dari perspektif *customer*. Layanan yang diberikan oleh Biro kepada pihak eksternal mencakup berbagai unsur mencakup persyaratan; sistem mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis layanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan; serta sarana dan prasarana.

Di sisi lain, kepuasan terhadap pelayanan internal juga memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian pelayanan internal ini dapat dilihat melalui beberapa dimensi utama, yaitu ketanggapan dalam pelayanan (*responsiveness*); keandalan dalam pelayanan (*reliability*); sarana dan prasarana fisik (*tangible*); kepastian dalam pelayanan (*assurance*); serta sikap dalam pelayanan (*empathy*), yang menggambarkan perhatian, komunikasi, dan pemahaman terhadap kebutuhan antar unit kerja.

Indeks kepuasan layanan digunakan sebagai metode evaluasi untuk mengukur kualitas pelayanan yang diselenggarakan. Pada Triwulan I tahun 2026, penyusunan Indeks Kepuasan Layanan fasilitas perencanaan dan pembentukan KEK telah dilaksanakan, dengan ringkasan hasil sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja kepuasan perencanaan dan pembentukan KEK sebesar **3,1 dari skala 4** yang pada tahun 2026 dan 3,1 dari skala 4 untuk Triwulan I, tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Pada Triwulan I tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Pembentukan KEK sesuai target yang terealisasi sebesar 3,3 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian s.d TW I
IKU 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Pembentukan KEK	Indeks	3,1 (skala 4)	3,3*	106,5%*

*) Data survei layanan per TW IV 2025

Indeks kepuasan layanan perencanaan dan pembentukan KEK dihitung berdasarkan hasil survei yang disampaikan kepada Badan Usaha Pembangun dan Pengelola, kementerian/lembaga, serta antar satuan kerja dengan mempertimbangkan layanan utama yang diberikan. Nilai akhir indeks diperoleh melalui perhitungan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \sum (\text{Nilai unsur survei kepuasan layanan internal} \times 50\%) + (\text{Nilai unsur survei kepuasan layanan eksternal} \times 50\%)$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Penyusunan kuesioner survei pelayanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan survei pelayanan internal dan eksternal.
2	Pelaksanaan survei pelayanan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK	Belum terlaksana	Belum dilaksanakan survei pelayanan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK
3	Analisis indeks kepuasan layanan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK	Belum terlaksana	Belum dilaksanakan analisis indeks kepuasan layanan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK telah menyusun kuesioner survei pelayanan untuk Tahun 2026. Namun demikian, penyebaran survei layanan serta pelaksanaan koordinasi yang diperlukan yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan biro belum terlaksana pada periode tersebut. Oleh karena itu, analisis data survei kepuasan layanan masih mengacu pada hasil survei Triwulan IV Tahun 2025.

Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dapat terukur secara akurat serta mencapai target yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar dalam peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I 2026, terdapat beberapa kendala dalam mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain ketidaksesuaian waktu pelaksanaan survei akibat lamanya penyusunan instrumen karena keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kegiatan akibat perubahan prioritas, keterbatasan sistem survei, koordinasi antar satuan kerja yang belum optimal, serta keterbatasan waktu untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil survei.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 3: Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas, ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yang terdiri dari:

3.1 Persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Latar Belakang

KEK berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan KEK yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi

wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan KEK yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN.

Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi pada seluruh rangkaian kegiatan Dewan Nasional. Selain itu, Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus juga bertugas untuk mengkoordinasikan dan menyusun rencana kinerja program dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Koordinasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan dengan tujuan untuk sinkronisasi program dan rencana kerja seluruh unit di bawah Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, finalisasi dalam kegiatan perencanaan anggaran juga dibutuhkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendukung pelaksanaan kinerja program dan kegiatan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional adalah 90%, sedangkan target Triwulan I 2026 sebesar 20%. Target tahun 2026 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 45% dari target 90% pada Tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian s.d. TW I
IKU-3.1 Persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	%	90%	45%	50%

Indikator ini mengukur perencanaan kinerja dan kebijakan pada program dan anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Kinerja dan kebijakan yang direncanakan yang menjadi siklus satu tahun anggaran antara lain:

- Monitoring Capaian PN
- Profil Risiko UKE II 2026
- Penyusunan Rencana Kerja UKE I 2027
- DIPA dan POK Satker KEK 2027
- Penyusunan Perjanjian Kinerja 2026 UKE I dan UKE II
- Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK
- Laporan Capaian Output dan e-Monev
- Penyusunan Lakip Setjen DN KEK Tahun 2026

Capaian indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{Perencanaan Kinerja dan Kebijakan}}{= \sum (\text{kinerja dan kebijakan yang diselesaikan} \times \text{bobot})}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Perencanaan program dan kinerja 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan perencanaan program dan kinerja 2026 bersama Biro dan Administrator.
2	Perencanaan anggaran 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan perencanaan anggaran 2026 bersama Biro dan Administrator.
3	Monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran 2025

Pada Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan berbagai kegiatan perencanaan program dan kinerja 2026, perencanaan anggaran 2026 dan monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran 2025 oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK. Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK mengundang para Kepala Biro dan Administrator KEK untuk melakukan dialog kinerja Perencanaan program dan kinerja 2026 triwulan I dan Perencanaan anggaran 2026 pada tanggal 26- 28 Januari 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional pada Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

3.2 Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan Kajian Pembentukan KEK yang Tepat Waktu

Latar Belakang

KEK berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan KEK yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain

pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN. KEK yang sudah terbangun atau sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah harus melakukan *monitoring* evaluasi terhadap KEK yang dibentuk, karena hasil evaluasi tersebut akan terbentuk sebuah rekomendasi penetapan KEK.

Fasilitasi pembentukan KEK adalah metrik pengukuran penyelesaian fasilitasi pembentukan KEK. Fasilitasi ini mencakup serangkaian langkah tindak lanjut yang dilakukan terhadap permohonan audiensi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berminat mengetahui tentang KEK. Dalam hal ini, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berperan aktif sebagai fasilitator dengan memberikan berbagai bentuk dukungan, salah satunya melalui penyelenggaraan audiensi. Kegiatan tersebut ditujukan kepada para pengusul, baik dari pemerintah daerah, badan usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya, yang ingin memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai prosedur, persyaratan, dan manfaat dari pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan demikian, fasilitasi ini tidak hanya menjadi bentuk respons administratif, tetapi juga bagian dari upaya strategis untuk memperluas pemahaman dan minat terhadap pengembangan KEK di berbagai wilayah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pelaksanaan evaluasi dan kajian pembentukan KEK yang tepat waktu adalah 90%, sedangkan target Triwulan I 2026 sebesar 20%. Target tahun 2026 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian s.d. TW I
IKU-3.2 Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan Kajian Pembentukan KEK yang Tepat Waktu	%	90%	100%	111,11%

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase jumlah permohonan audiensi yang diajukan oleh para pengusul KEK yang kemudian ditindaklanjuti oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, baik melalui pelaksanaan audiensi secara langsung maupun melalui bentuk tindak lanjut lainnya yang relevan. Tingkat capaian dari indikator ini mencerminkan sejauh mana efektivitas biro dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk. Capaian ini dihitung dengan menggunakan rumus tertentu, yang dirancang untuk menilai rasio antara jumlah permohonan yang difasilitasi dengan total permohonan yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Adapun rumus perhitungan capaian tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{\%Fasilitasi Pembentukan KEK Tepat Waktu} = \left(\frac{(\sum \text{tindak lanjut usulan KEK})}{(\sum \text{permohonan audiensi oleh pengusul})} \times 100\% \right)$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	Melakukan audiensi usulan pembentukan KEK dengan pengusul	Terlaksana	Telah dilakukan audiensi atas 10 (sepuluh) usulan, antara lain: a) usulan KEK di Sumatera Utara; b) usulan KEK di Gorontalo; c) usulan KEK di Bontang; d) usulan KEK di Bintan; e) usulan KEK di Jawa Barat; f) usulan KEK di Bangka Belitung; g) usulan KEK di Probolinggo; h) usulan KEK oleh di Jawa Barat; i) usulan KEK di Sulawesi Tenggara; dan j) usulan KEK di Serang.
2.	Evaluasi atas kelengkapan dokumen usulan	Terlaksana	Telah dilakukan evaluasi atas kelengkapan dokumen usulan perluasan KEK Galang Batang
3	Kajian usulan pembentukan KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan kajian dokumen usulan perluasan KEK Galang Batang.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK telah memfasilitasi 10 (sepuluh) permohonan audiensi yang berkaitan dengan rencana pembentukan KEK baru antara lain: a) usulan KEK di Sumatera Utara; b) usulan KEK di Gorontalo; c) usulan KEK di Bontang; d) usulan KEK di Bintan ; e) usulan KEK di Jawa Barat; f) usulan KEK di Sungailiat; g) usulan KEK di Probolinggo; h) usulan KEK di Jawa Barat; i) usulan KEK di Sulawesi Tenggara; dan j) usulan KEK di Serang. Tindak lanjut dari audiensi ialah penyusunan laporan hasil audiensi yang selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK.

Selain itu, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK melakukan evaluasi atas kelengkapan dokumen usulan perluasan KEK Galang batang. Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian, diketahui bahwa usulan perluasan KEK Galang Batang pada Provinsi Kepulauan Riau belum memenuhi persyaratan, sehingga usulan tersebut dikembalikan kepada BUPP.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga dengan Triwulan I 2026 belum terdapat kendala yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi pembentukan KEK. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan kegiatan tindak lanjut atas permohonan audiensi usulan pembentukan KEK. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

3.3 Persentase Penyelesaian Koordinasi Strategi Pengembangan dan Penetapan KEK

Latar Belakang

KEK berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan KEK yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang berstandar internasional, tentunya memerlukan adanya rekomendasi perkembangan dan pembentukan KEK yang baru. Dengan adanya UUCK, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dapat diinisiasi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan kajian rekomendasi wilayah yang berpotensi, serta sektor industri apa saja yang memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi. Hal tersebut bertujuan agar pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ini memiliki dampak positif, baik secara ekonomi maupun secara sosial, seperti halnya tujuan dari Kawasan Ekonomi Khusus itu sendiri, yaitu untuk menumbuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan membentuk pertumbuhan ekonomi baru di daerah pinggiran.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja penyelesaian koordinasi strategi pengembangan dan penetapan KEK adalah 90%, sedangkan target Triwulan I sebesar 20%. Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 33% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian s.d. TW I
IKU-3.3 Persentase Penyelesaian Koordinasi Strategi Pengembangan dan Penetapan KEK	%	90%	33%	37%

Indikator ini mengukur kajian pengembangan KEK yang diselesaikan terhadap kajian pengembangan KEK yang direncanakan. Indikator ini bertujuan untuk Melakukan penyusunan rencana strategis pengembangan wilayah dan memberikan rekomendasi pengembangan pada Kawasan Ekonomi Khusus yang berupa kajian masterplan KEK yang mengacu berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun

2024 tentang Pedoman Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus Capaian ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{Kajian pengembangan KEK}}{\sum} = \frac{\sum \text{Kajian pengembangan KEK yang diselesaikan}}{\sum \text{Kajian pengembangan KEK yang direncanakan}} \times 100\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	Pengecekan kelengkapan Masterplan KEK sesuai Pedoman Masterplan KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengecekan kelengkapan masterplan KEK sesuai pedoman sebanyak 8 (delapan) dokumen masterplan
2.	Pembahasan Masterplan KEK bersama BUPP dan/atau K/L terkait	Terlaksana	Telah dilaksanakan pembahasan Masterplan KEK sebanyak 5 (lima) kali bersama BUPP
3	Persetujuan Endorsement Penetapan Penyesuaian Masterplan KEK oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK	Belum terlaksana	Dokumen masterplan yang dikirimkan oleh BUPP belum sesuai dengan SE Pedoman Penyusunan Masterpal KEK

Pada Triwulan I Tahun 2026, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK melakukan pengecekan dan pembahasan terdapat beberapa dokumen masterplan KEK. Dokumen Masterplan KEK yang dilakukan pengecekan antara lain Masterplan KEK Arun Lhokseumawe, Masterplan KEK Morotai, Masterplan KEK MBTK, Masterplan KEK Tanjung Kelayang dan Masterplan KEK Palu. Selanjutnya, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK melakukan pembahasan secara substantif dan teknis terkait Masterplan bersama BUPP KEK Arun Lhokseumawe, BUPP KEK Morotai, BUPP KEK MBTK, BUPP KEK Palu, dan BUPP KEK Tanjung Kelayang. Setelah dilakukan pembahasan, BUPP selanjutnya akan melakukan penyesuaian dokumen masterplan KEK sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I 2026 tidak terdapat kendala yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penyelesaian Koordinasi Strategi Pengembangan dan Penetapan KEK. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya.

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya rekomendasi kualitas kinerja pelaksanaan pengawasan internal yang dituangkan dalam indikator kinerja, yaitu

4.1 Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Latar Belakang

Tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program kegiatan dengan baik. Pada pelaksanaannya, program kegiatan ini juga ditunjang dengan kegiatan administrasi program dan tata kelola yang merupakan suatu proses kebiasaan, kebijakan dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan terstruktur, sarana/prasarana kerja yang memadai, manajemen kepegawaian yang andal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK adalah 90%. Target tahun 2026 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 29%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian s.d. TW I
IKU-4.1 Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	%	90%	29%	33%

Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK secara lebih lanjut menjadi indikator kinerja untuk mendukung peran strategis Bagian Pengawasan menjadi *strategic partner* dan *trusted advisor* yang dapat memberikan nilai tambah organisasi.

Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Gambaran aktivitas atas pelaksanaan pengawasan tersebut adalah perencanaan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan terhadap penyelenggaraan fungsi dan tugas organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator atau standar yang telah ditetapkan. Indikator ini dituangkan dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki peran sebagai instrumen *monitoring* dan kendali organisasi agar mampu mencapai tujuan atau target dari suatu organisasi bagi keseluruhan unit atau biro. Selama periode siklus tahunan yang direncanakan merupakan Kegiatan Pengawasan Internal meliputi *monitoring* Pelaksanaan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Manajemen Risiko, dan lain-lain. Sedangkan pengawasan internal yang ditindaklanjuti merupakan kegiatan pengawasan internal yang diselesaikan pada periode tertentu.

Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan internal diwujudkan dalam bentuk persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan internal yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Pelaksanaan pengawasan} = \frac{\sum \text{Kegiatan pengawasan internal yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Kegiatan pengawasan internal yang direncanakan}} \times 100\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	Perencanaan Pengawasan	Terlaksana	• Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Bagian Pengawasan untuk tahun anggaran 2026
2	Pelaksanaan kegiatan pengawasan	Terlaksana	• Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Eselon Dua Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK; • Penyusunan dokumen pengadministrasian bagian pengawasan; • Pelaksanaan audit kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) tahun anggaran 2025 hingga tahap pendokumentasian data dan informasi di bawah Koordinasi Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; • Pelaksanaan monitoring atas pelaporan implementasi manajemen risiko Tahun Anggaran 2025 untuk periode Semester II; • Penyusunan dokumen pengadministrasian bagian pengawasan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat panel dengan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendukung kelancaran koordinasi pelaksanaan Audit atas Kepatuhan terhadap

- Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun Anggaran 2025;
2. Pelaksanaan monitoring pelaporan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 juga telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK memiliki pagu anggaran dari kegiatan Rekomendasi Pengawasan Internal, yang terdiri atas kegiatan Perencanaan Pengawasan Kelembagaan dan Pelaksanaan Pengawasan, yang hingga Triwulan I Tahun 2026, anggaran yang telah diserap sebesar 4,10% dari anggaran kegiatan yang diberikan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, kendala yang memengaruhi ketercapaian rencana aksi di antaranya kekosongan posisi Kepala Bagian Pengawasan yang membuat beberapa program kegiatan pengawasan tidak terlaksana dan tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan membutuhkan arahan yang tepat terkait metode pelaksanaannya serta berdampak di koordinasi yang belum terlaksana secara maksimal, baik koordinasi secara internal maupun eksternal. Selain itu, kendala yang dihadapi juga berkaitan dengan belum ditetapkannya pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan Administrator KEK.

Upaya perbaikan dan peningkatan pencapaian target yang akan dilakukan, yaitu dengan meningkatkan koordinasi antar unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan koordinasi dengan Instansi/Kementerian/Lembaga Lainnya serta menetapkan pedoman dan SOP bagian pengawasan.

5

Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik

Pencapaian Sasaran Program 5 adalah terwujudnya tata kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK yang baik, yang dituangkan dalam indikator berupa:

5.1 Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Latar Belakang

Indeks tata kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus diambil dari penilaian terkait dengan aspek kualitas pelaksanaan kinerja perencanaan yang dilakukan dalam biro perencanaan dan pembentukan KEK. Pada pelaksanaannya, program kegiatan ini juga ditunjang dengan kegiatan mengukur kualitas atas pelaksanaan kinerja perencanaan dan pembentukan KEK dan mengukur Nilai Kinerja Anggaran. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung dengan manajemen internal yang efektif dan efisien atas penggunaan anggaran dan ketercapaian output yang dihasilkan. Selain itu nilai kinerja anggaran merupakan mengukur ketercapaian output dan nilai efisiensi dan efektivitas anggaran output yang dihasilkan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Program Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus senilai 3 (dari skala 4). Target tahun 2026 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi senilai 1 atau sebesar 33,3%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi TW I	% Capaian s.d. TW I
IKU-5.1 Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	nilai	3 (skala 4)	1	33,3%

Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus secara lebih lanjut akan mengukur kesesuaian terhadap beberapa indikator, diantaranya pada pelaksanaan tata kelola perencanaan, serta pelaksanaan tata kelola program dan anggaran. Penilaian kualitas tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelaksanaan kegiatan dari sisi kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku dalam lingkup Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK. Indeks tata kelola menggunakan unsur pelaksanaan rencana kerja biro perencanaan dan pembentukan KEK yang dipresentasikan melalui terlaksana rencana kerja dibagi dengan rencana kerja. Tata kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dihitung berdasarkan capaian realisasi anggaran, capaian output, dan capaian pengembangan SDM. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, ditetapkan Target TW I untuk kinerja penyerapan anggaran pada belanja barang sebesar 15%. Adapun Implementasi pelaksanaan program Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK diukur berdasarkan formula perhitungan berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Indeks Tata Kelola} \\
 &\text{Biro Perencanaan} \\
 &\text{dan Pembentukan} \\
 &\text{KEK}
 \end{aligned}
 =
 \begin{aligned}
 &(\text{Capaian Realisasi Anggaran} \times 45\%) \\
 &+ (\text{Capaian Output} \times 45\%) \\
 &+ (\text{Pengembangan SDM} \times 10\%)
 \end{aligned}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk mengukur kualitas dan kesesuaian pelaksanaan kinerja perencanaan dan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas capaian realisasi anggaran, capaian *output*, dan capaian pengembangan SDM. Capaian realisasi anggaran berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional. Capaian *output* menggambarkan capaian rincian output (RO) pada setiap kegiatan. Sedangkan capaian pengembangan SDM menggambarkan persentase ASN di Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK yang telah melaksanakan pembelajaran sebesar 20 JP. Adapun pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	Monitoring capaian realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK	Terlaksana	Telah disusunnya laporan realisasi anggaran dengan keterangan kegiatan yang telah dilakukan selama bulan berjalan sehingga dapat diketahui persentase

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
			realisasi pada tiap kegiatan. Kemudian, telah dilakukan revisi POK, revisi DIPA, dan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam rangka pemenuhan belanja operasional serta penyesuaian kebutuhan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja.
2	Monitoring capaian output Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK	Terlaksana	Telah disusunnya dashboard capaian output yang terintegrasi dengan rencana kerja Tahun 2026 sebagai alat monitoring kegiatan yang telah terlaksana pada Biro dan Administrator. Kemudian, telah disusunnya dashboard capaian kinerja dan dokumen narasi kinerja untuk memantau ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang dikeluarkan.
3	Pengembangan kapasitas SDM	Terlaksana	Pada TW 1 2026, rata-rata pegawai Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK telah menyelesaikan 7 JP. Selain itu, terdapat 2 staff di Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK yang telah menyelesaikan pembelajaran minimal 20 JP.

Berkaitan dengan rencana kerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, telah dilakukan sejumlah langkah pendukung guna memastikan program berjalan dengan efektif dan efisien. Penyesuaian program dan anggaran dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan menjaga agar pelaksanaan program tetap sesuai target yang telah ditetapkan. Program kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:

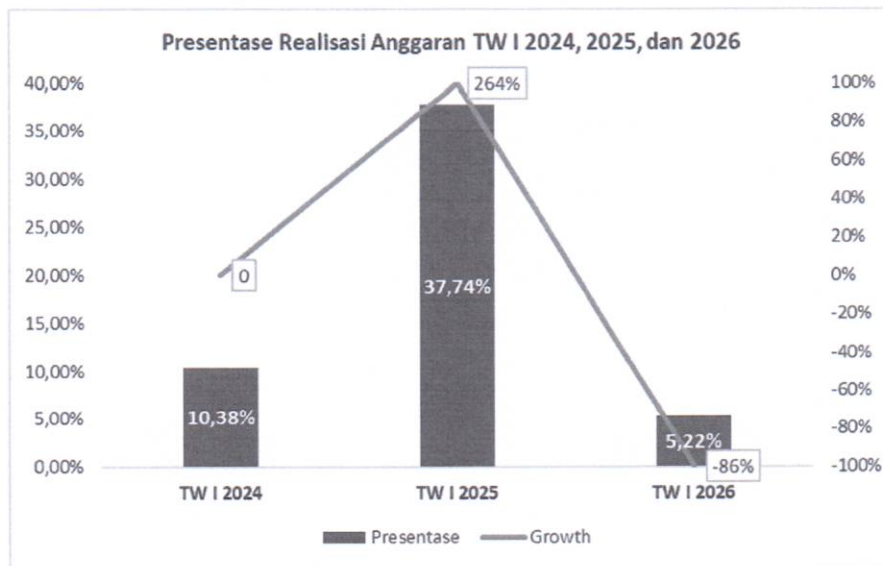
1. Koordinasi internal revisi DIPA 2026 untuk menyesuaikan pagu efisiensi dengan kebutuhan kegiatan;
2. *Monitoring* program secara periodik guna memastikan kesesuaian perencanaan dan capaian *output*;
3. Penyusunan laporan realisasi anggaran disertai *trendline* bulanan untuk memantau serapan dan sisa dana;
4. Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) TW I 2026;
5. Penyusunan dan Penyampaian Narasi Kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK Triwulan I TA 2025;

6. Dialog Kinerja untuk Administrator KEK;
7. Coaching Clinic penyesuaian masterplan KEK;
8. Penyusunan Laporan Usulan Pembentukan KEK Tahun 2025;
9. Penyusunan Rencana Kerja dan Konsep Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK T.A 2026;
10. Pembahasan Konfirmasi Dokumen Persyaratan Usulan Perluasan KEK;
11. Penyusunan laporan Manajemen Risiko Semester II TA 2025;
12. Koordinasi Pembahasan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022;
13. Penyampaian Pagu dan Rencana Realokasi Anggaran Unit Kerja Biro dan Administrator KEK TA 2026;
14. Pembahasan Rencana Strategis UKE 1 pada Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Nasional KEK;
15. Koordinasi Audiensi dan Kajian Pengusulan KEK;
16. Penyampaian Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemanfaatan Rincian Output Direktif Presiden;
17. Rapat Pembahasan Tanggapan Bukti Dukung Tambahan Tindak Lanjut LHP BPK 2019-2023;
18. Rapat Tindak Lanjut Pelanggaran Etika;
19. Pendampingan atas kegiatan Audit Investigasi oleh Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan;
20. Forum Group Discussion (FGD) Sinergi Stakeholder Dalam Mendukung Keberlanjutan Pelaku Usaha;
21. Pembahasan Standar Data Geospasial Pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
22. Pembahasan isu strategis tata ruang KEK;
23. Rapat Pertemuan Awal Penyusunan Tim Sinkronisasi Perencanaan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Data Center Nasional;
24. Pengembangan kompetensi dan kualitas pegawai melalui kegiatan pelatihan;
25. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK T.A. 2025;
26. Tinjauan Lapangan usulan perluasan KEK;

Pada pelaksanaan tata kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK juga telah dilaksanakan pelayanan internal biro seperti terkait dengan pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, perencanaan kinerja program dan anggaran, sinkronisasi rencana kerja dan anggaran biro. Untuk aspek pelayanan ketatausahaan, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK senantiasa mengupayakan pengelolaan tata kelola administrasi yang efektif dan efisien melalui pengendalian arus surat. Pada Triwulan I Tahun 2026, rekapitulasi jumlah surat masuk telah tercatat sebanyak 209 surat. Sebanyak 100% surat telah ditindaklanjuti melalui pemberian disposisi dan bentuk tindak lanjut surat lainnya. Pada aspek kerumahtanggaan, pelayanan mencakup penyediaan kebutuhan konsumsi rapat guna mendukung kelancaran kegiatan operasional.

Pada Triwulan I, besar anggaran yang telah terserap sebesar 5,22% dari keseluruhan pagu awal. Dari nilai tersebut, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK memiliki 2 kegiatan, yaitu pengawasan internal dengan serapan anggaran sebesar 4,10% dari total anggaran yang diberikan, serta perencanaan dan pembentukan KEK dengan serapan anggaran sebesar 5,40% dari total anggaran yang diberikan.

Grafik 1.1 Persentase Realisasi Anggaran TW I 2024, 2025, dan 2026



Sumber: Data SP2D 2024-2026

Berdasarkan data SP2D, persentase realisasi anggaran menunjukkan tren yang fluktuatif. Jika dibandingkan antara Triwulan I TA 2024 dan Triwulan I TA 2025, terjadi peningkatan sebesar 264%. Namun, apabila dibandingkan antara Triwulan I TA 2025 dan Triwulan I TA 2026, terjadi penurunan sebesar 86%. Lebih lanjut, realisasi anggaran pada Triwulan I TA 2026 apabila dibandingkan dengan Triwulan I TA 2024, juga masih menunjukkan penurunan atau *minus growth* sebesar 49%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian realisasi anggaran pada Triwulan I TA 2026 relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan belum menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang optimal. Adapun hal ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran yang tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK melakukan skema realokasi anggaran secara internal untuk menutupi kekurangan alokasi belanja operasional. Kondisi ini mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK sehingga belum berjalan secara optimal, dikarenakan adanya kebutuhan anggaran yang lebih prioritas. Selain itu, perbedaan pagu anggaran antara TA 2025 dan TA 2026 juga turut mempengaruhi capaian realisasi anggaran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2026, kendala yang umum ditemui pada pelaksanaan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berkaitan dengan ketidaksesuaian realisasi waktu pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan, yang disebabkan karena kondisi insidental dan prioritas yang berubah seiring dengan tingkat urgensi pada masing-masing kegiatan. Selain itu, masih terdapat pengusul yang telah melaksanakan audiensi namun belum melengkapi berkas/dokumen persyaratan, sehingga mengakibatkan keterlambatan proses dan usulan belum dapat ditindaklanjuti. Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berupaya untuk terus memperbaiki hal tersebut agar kualitas kinerja pelaksanaan program dan anggaran Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dapat mencapai target, dengan melaksanakan rapat kerja, penyusunan *database monitoring*, dan pelaporan berkala.

Demikian laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026 kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak

yang telah berkontribusi dalam pencapaian target dan program yang ditetapkan. Kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan efisiensi, serta menyongsong tantangan dan peluang ke depan dengan penuh semangat dan dedikasi. Semoga laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan yang dicapai serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK yang lebih baik.

Jakarta, April 2026
Kepala Biro Perencanaan dan
Pembentukan KEK



Paulus Riyanto
NIP.197609212002121002

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pembahasan Rencana Strategis UKE 1 pada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK (15 Januari 2026)



Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2026

Lampiran 2. Dialog Kinerja Tahun 2026 pada Administrator KEK (27 Januari 2026)



Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2026

Lampiran 3. Pembahasan Bukti Dukung Tambahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (5 Februari 2026)



Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2026

Lampiran 4. Audiensi Usulan KEK Kawasan Industri Bontang (19 Februari 2026)



Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2026

Lampiran 5. Pembahasan Isu Strategis Tata Ruang KEK (4 Maret 2026)



Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2026

Lampiran 6. Pembahasan Standar Data Geospasial Pada Kawasan Ekonomi Khusus (9 Maret 2026)



Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2026